

VI. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab V mengenai Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro dalam pembinaan pendidikan politik masyarakat. Kantor Kesatuan bangsa dan politik kota metro sebagai lembaga Negara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang politik pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat, Ormas, dan LSM.
2. Dilihat dari aspek Produktivitas Yaitu kesesuaian antara rencana kerja yang telah dibuat dengan realisasi yang telah dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan politik telah menjalankan rencana kerja mengenai pembinaan pendidikan politik yakni dengan mengadakan kegiatan pembinaan pendidikan politik serta dalam kurun waktu tahun 2013 telah mengeluarkan izin kepada masyarakat, ormas atau instansi pemerintah yang ingin mengadakan kegiatan pembinaan pendidikan politik sebanyak 26 izin dari 30 izin yang masuk ke kantor tersebut.
3. Aspek Responsivitas adalah penggambaran kemampuan kantor kesatuan bangsa dan politik kota metro dalam menjalankan visi, misi dan tujuannya. Dalam memberikan pembinaan Kantor kesatuan bangsa dan politik sudah memiliki cara yang baik dalam pelaksanaannya karena pembinaan di lakukan keberbagai kalangan masyarakat. Dalam hal pemberian izin kegiatan yang

berhubungan dengan pembinaan pendidikan politik memiliki alur yang baik dalam prosedur pemberian izin. Masyarakat, Ormas atau Instansi pemerintah yang ingin mengajukan permohonan izin harus melengkapi persyaratan dan mengikuti prosedur dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public yang diharapkan dari masyarakat. Dalam penelitian ini Kantor Kesatuan Bangsa dan politik sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan pembinaan pendidikan politik dan juga sudah melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan politik menjelang pemilu tahun 2014

5. Bentuk pembinaan pendidikan politik dalam kegiatan forum komunikasi partai politik berupa pembinaan bagaimana cara berkampanye dengan baik dan benar agar dapat menarik suara pemilih dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bentuk pendidikan politik dalam kegiatan pengembangan masyarakat sadar politik berupa pembinaan pendidikan politik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Bentuk pembinaan pendidikan politik dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan budaya politik masyarakat berupa memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi tentang politik dan pembinaan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan materi yang disampaikan meliputi bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan tata cara bagaimana mencoblos dalam pemilu. Bentuk pembinaan pendidikan politik dalam kegiatan penataan ornament organisasi politik dan organisasi

masyarakat pada median jalan berupa pembinaan penataan ornament politik yang baik dan benar sehingga tidak merusak keindahan kota metro.

6. Faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pembinaan pendidikan politik adalah dana minim yang diberikan pemerintah kepada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan politik. Faktor yang kedua adalah kurangnya SDM yang berkualitas yang menguasai bidang politik karena pegawai yang menguasai kajian ilmu politik hanya satu orang yakni kepala seksi politik dari kantor tersebut.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, pada kesempatan ini, penulis menyarankan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebaiknya dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro adalah dengan meningkatkan jumlah SDM yang menguasai kajian ilmu politik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan sehingga masyarakat akan puas dengan pelayanan yang diberikan.
2. Melihat dari Produktivitas sebaiknya kantor kesatuan bangsa dan politik lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membuat izin kegiatan sehingga rencana kegiatan dapat sesuai dengan realisasi.
3. Untuk aspek responsivitas sebaiknya kantor kesatuan bangsa dan politik kota metro terlebih dahulu memberikan informasi bagaimana prosedur permohonan

izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada lagi izin yang ditolak karena persyaratannya tidak lengkap.

4. Dalam segi akuntabilitas kantor kesatuan bangsa dan politik kota metro sebaiknya lebih meningkatkan lagi kinerjanya sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin bertambah.